

Perjanjian No: III/LPPM/2014-03/30-P

**IDENTIFIKASI FISIK ARSITEKTUR KAWASAN
PERMUKIMAN ETNIS TEPI SUNGAI MUSI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN ASPEK PERATURAN**



**Disusun Oleh:
Dr.Purnama Salura
Dr.Rumiati Rosaline Tobing
Alfred**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2014**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	1
Abstrak	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Lingkup Penelitian	8
1.4 Tesa Kerja	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Rujukan Terhadap Penelitian yang Pernah Dilakukan	9
1.8 Posisi Penelitian	11
1.9 Penentuan Kasus Studi	11
1.10 Kerangka Pemikiran	15
1.11 Kerangka Penelitian	16
1.12 Metode dan Langkah Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORITIK	20
2.1 Kekuatan Politik Pemerintahan dan Arsitektur	20
2.2 Gambaran Umum Kota Sungai	24
2.2.1 Masa Pemerintahan Pra Kolonial	25
2.2.2 Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	27
2.3 Kota Sungai Masa Pemerintahan Republik Indonesia	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pengumpulan Data	34
3.2 Kajian Teoritik	34
3.3 Pengolahan Data	35
3.4 Penarikan Kesimpulan	35
BAB IV STATUS PENELITIAN	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	37
Daftar Pustaka	38
LAMPIRAN GAMBARAN KAWASAN	

ABSTRAK

Wujud arsitektur permukiman di tepi sungai merupakan representasi nilai-nilai perilaku masyarakat yang tinggal di tepi sungai dengan berbagai aspek kehidupan yang melatarbelakangi seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah menyebutkan bahwa kebijakan mengenai kawasan permukiman di Indonesia sudah dimulai sejak masa Pra-Kolonial, kemudian berlanjut pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, hingga pada masa Pemerintahan Republik Indonesia. Kebijakan pada masa Pra-Kolonial dan masa Kolonial Belanda lebih menekankan fungsi sungai sebagai kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, kebijakan lebih didasarkan pada fungsi ekologis sungai yang dirumuskan dalam peraturan mengenai garis sempadan sungai.

Kebijakan ini menyatakan bahwa seluruh bangunan yang berada di dalam garis sempadan sungai harus ditertibkan agar aktifitas manusia dan fungsi sungai tidak saling terganggu. Dalam kesehariannya, aktifitas masyarakat tepi sungai tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sungai. Secara tidak langsung, kebijakan ini akan menghilangkan tradisi bermukim masyarakat tepi sungai. Padahal tradisi bermukim di tepi sungai ini merupakan salah satu kekhasan yang menjadi identitas lokal masyarakat Indonesia sebagai negara maritim.

Dapat dilihat bahwa aspek politik berperan penting dalam proses penataan lingkungan fisik dan bangunan permukiman di tepi sungai. Manifestasi kekuasaan di dalam arsitektur dapat ditelaah melalui aspek *power*, *program*, *text*, dan *place* seperti yang diungkapkan oleh Kim Dovey. Arsitektur permukiman di tepi sungai juga dapat ditelaah melalui indikator desain *riverfront* yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan kawasan permukiman di tepi sungai.

Kata Kunci : Kebijakan, Arsitektur Tepi sungai, Tata ruang dan bangunan, Permukiman dan perumahan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Permukiman Tepi Sungai Sebagai Cikal Bakal Sebuah Kota

Sungai merupakan elemen fisik alami yang membentuk lansekap bumi selain daratan. Ruang sungai secara alami ditentukan oleh pola aliran airnya. Ruang sungai dan ruang daratan mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Dalam hal ini, air harus dipandang sebagai faktor pengarah dalam perencanaan tata ruang dan peruntukan lahan. Namun secara dinamis, air juga dipengaruhi oleh peruntukan lahan. Dengan demikian, kebijakan tentang lahan juga berpengaruh pada kebijakan tentang lingkungan air.

Sejarah mencatat bahwa sungai merupakan tempat berawalnya peradaban. Sebagai sumber kehidupan, sungai bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Disamping untuk keseimbangan ekosistem alam, bagi manusia sungai bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan perekonomian, transportasi, dan sebagainya. Begitu pentingnya keberadaan sungai membuat aktifitas sehari-hari penduduk yang tinggal di sekitarnya tidak terlepas dari sungai sehingga pada akhirnya terbentuk kebudayaan masyarakat di tepi sungai. Seiring dengan modernisasi, peradaban di sekitar tepi sungai terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan yang terjadi, tak lain disebabkan oleh tingginya intensitas pertukaran informasi masyarakat antar daerah dengan beragam latar belakang. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi dan aktifitas penduduk pada tepi sungai, bahkan beberapa diantaranya tumbuh dan berkembang menjadi kota.

Terkonsentrasinya pembangunan di sekitar aliran sungai ditandai dengan banyak didirikannya pusat-pusat kegiatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sektor perekonomian dan perindustrian. Hal ini semakin didukung oleh fungsi sungai sebagai sarana transportasi yang mengakomodasi kegiatan distribusi komoditas antar daerah sehingga banyak dibangun pelabuhan di sepanjang aliran sungai. Meningkatnya aktifitas perekonomian di sekitar tepi sungai diiringi juga dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan permukiman di tepi sungai.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman tidak hanya

terjadi di tepi sungai, tetapi juga meluas ke wilayah daratan. Pesatnya pembangunan di wilayah daratan ini mulai diperkenalkan oleh Bangsa Eropa, yaitu dengan membangun jalan raya pos sebagai kekuatan keamanan dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan pasukan infanterinya dalam peperangan dan penaklukan. Pembuatan jalan raya pos ini kemudian diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan bangunan-bangunan strategis lainnya. Arah pembangunan ke wilayah daratan ini kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Republik Indonesia yang dirumuskan dalam berbagai kebijakan tata ruang dan wilayah.

Pembangunan rupanya tidak berjalan seimbang antara wilayah daratan dan wilayah tepi sungai, sehingga terjadi kesenjangan diantara keduanya. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kawasan permukiman di tepi sungai yang sudah ada sebelumnya. Pada beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Banjarmasin, banyak terjadi perubahan orientasi kawasan permukiman di tepi sungai. Jika sebelumnya sungai merupakan bagian depan, maka setelah pembangunan di wilayah daratansungai menjadi bagian belakang dan seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Inilah yang menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan sungai, baik fisik maupun non-fisik.

Namun, fenomena ini rupanya tidak berlaku merata pada seluruh aliran sungai di Indonesia. Di beberapa daerah, tatanan permukiman di kawasan tepi aliran sungai masih menerapkan pola yang mencerminkan perilaku masyarakat tepi sungai sebagai warisan leluhur. Pola ini terlihat pada tatanan bangunan rumah tinggal yang masih berorientasi ke arah sungai. Dari tatanan ini dapat diketahui bahwa fungsi sungai masih memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Sebagai contoh, salah satu kawasan permukiman di Indonesia yang masih berorientasi terhadap aliran sungai adalah kawasan permukiman yang berada di tepi aliran Sungai Musi di Kota Palembang. Kawasan permukiman tersebut merupakan kumpulan rumah penduduk dalam bentuk kampung. Sejak awal berdiri, kampung-kampung ini sudah melewati tiga periode pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Pra-Kolonial (masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang), masa pemerintahan Kolonial Belanda, dan masa pemerintahan Pasca-Kolonial (Pemerintah Republik

Indonesia) yang masih bertahan hingga saat ini.

Kampung Arab, Kampung Cina, dan Kampung Melayu merupakan kawasan permukiman penduduk yang dapat ditemukan di tepi aliran Sungai Musi. Terbentuknya kampung-kampung yang terklasifikasi berdasarkan etnis merupakan produk yang dihasilkan dari kebijakan yang diberlakukan sejak masa Pra-Kolonial, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Meskipun telah melewati beberapa pergantian sistem pemerintahan, kampung-kampung ini tetap bertahan dan masih menerapkan perilaku masyarakat tepi sungai. Hal ini tentu saja didukung oleh keberadaan Sungai Musi yang hingga saat ini masih memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya masyarakat yang bermukim di tepi aliran sungai. Selain berfungsi sebagai sumber kehidupan, Sungai Musi juga berfungsi sebagai sarana transportasi yang membangkitkan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi sebagai kekuatan utama.

Meningkatnya kekuatan ekonomi di tepi aliran Sungai Musi rupanya membawa dampak bagi perkembangan kawasan permukiman yang sudah ada. Pertumbuhannya yang relatif cepat dan tidak terkendali menjadikan kawasan permukiman di tepi aliran Sungai Musi menjadi sangat padat dan tidak teratur. Kondisi seperti ini cenderung menjadi fenomena pada permukiman tepi sungai di kota-kota besar, sehingga pada akhirnya Pemerintahan Republik Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai tata ruang sungai di Indonesia yang tercantum dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai" yang menyebutkan bahwa ruang sungai meliputi garis sempadan sungai di sisi kanan dan kirinya yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, dengan tujuan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu (Bab II, pasal 5, butir 5). Peraturan ini berlaku secara merata pada setiap sungai di Indonesia, meskipun besaran garis sempadan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sungainya.

Saat ini, kebijakan mengenai garis sempadan sungai menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menata kawasan tepi sungai. Kebijakan lainnya yang berkenaan dengan sungai lebih didasarkan pada pelestarian sungai sebagai ekosistem alami, seperti yang tercantum dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai."

Tidak seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011, pada kenyataannya fungsi sungai dan kegiatan manusia bukanlah dua hal yang bertolak belakang. Faktanya aktifitas sehari-hari masyarakat tepi sungai justru sangat bergantung pada keberadaan sungai. Sebagai dampak dari kebijakan ini, kawasan permukiman yang sudah ada sebagai wujud dari perilaku masyarakat tepi sungai terancam punah akibat penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Padahal tradisi bermukim di tepi sungai ini menghasilkan tipologi arsitektur tepi sungai yang khas sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi identitas lokal masyarakat Indonesia sebagai negara maritim.

Beberapa penelitian arsitektur mengenai kawasan pemukiman di sekitar aliran tepi sungai sudah pernah dilakukan. Beberapa contoh penelitian tersebut antara lain : transformasi orientasi hunian tepi sungai ke arah daratan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah daratan; kemudian pelestarian Kampung Arab di tepi Sungai Musi di tengah era modern; kampung kapitan interpretasi 'jejak' perkembangan permukiman dan elemen arsitektural, dan sebagainya. Namun, penelitian mengenai kawasan pemukiman di tepi sungai ditinjau dari aspek regulasi masih belum dilakukan. Kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman, khususnya yang ada di tepi sungai. Tidak hanya terbatas pada fungsi ekologi sungai, tetapi aspek politik, ekonomi, dan budaya turut berpengaruh dalam merumuskan kebijakan karena secara tidak langsung berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Kawasan permukiman di tepi Sungai Musi telah melalui proses pembentukan yang sangat panjang. Sejak awal berdirinya pada masa Kerajaan Sriwijaya, pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi diatur oleh penguasa, dengan tujuan agar pembangunan yang terjadi tidak mengganggu sungai sebagai sebuah sistem yang menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya.

Kawasan permukiman di tepi Sungai Musi ini mengalami tiga periode sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu masa pra-Kolonial (jaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang), masa pemerintahan Kolonial belanda, dan masa

pemerintahan Republik Indonesia (orde lama, orde baru, dan era reformasi). Situasi dan kondisi kehidupan masyarakat suatu periode bersifat situasional yang berbeda dengan situasi dan kondisi periode lain. Oleh karena itu kebijakan dan peraturan yang diberlakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada periode tersebut.

Tata ruang sungai di masa Pemerintahan Republik Indonesia saat ini yang diatur melalui peraturan Garis Sempadan Sungai (GSS) menekankan sungai sebagai sebuah fungsi ekologi. Di dalam peraturan GSS disebutkan bahwa di dalam wilayah batas garis sempadan tidak dibenarkan adanya bangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya (selain bangunan utilitas air dan listrik) dengan tujuan agar fungsi sungai dan aktifitas manusia tidak saling terganggu. Pernyataan ini bertolak belakang dengan situasi yang terjadi, bahwa sebagai negara maritim Indonesia memiliki banyak kota besar yang berkembang dari permukiman di tepi sungai yang kehidupan sehari-hari masyarakatnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai, salah satunya Kota Palembang di tepi Sungai Musi.

Pola hidup dan perilaku sehari-hari masyarakat di tepi Sungai Musi telah menjadi sistem sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Sungai tidak hanya dianggap sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki makna kosmologi dimana sungai menjadi pedoman dalam hidup sehari-hari yang tertuang dalam aturan-aturan. Contohnya Pancalang Lima dan Batanghari Sembilan yang dipakai masyarakat di tepi Sungai Musi dalam mendirikan rumah. Pemilihan lokasi dan orientasinya terhadap sungai menjadi pedoman yang telah dipegang teguh selama berabad-abad dan telah menjadi tradisi.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa terbentuknya kawasan permukiman di tepi sungai, khususnya Sungai Musi dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu peraturan formal yang diberlakukan oleh penguasa (aspek eksternal) dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat (aspek internal). Kedua aspek memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan sungai agar tetap lestari. Pada kenyataannya, kedua aspek tersebut terkadang berjalan seirama, tetapi bersifat kontradiktif. Dari kesimpulan tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut ini :

- (*What?*) Apa sajakah yang menjadi konsep pemikiran masyarakat di tepi Sungai Musi dalam membentuk tatanan huniannya?
- (*How?*) Bagaimana tatanan hunian yang terbentuk pada kawasan permukiman di tepi Sungai Musi sebagai perwujudan dari aspek legal (peraturan formal) dan tradisi masyarakat?
- (*Why?*) Mengapa peraturan formal dan tradisi masyarakat terkadang tidak sejalan dan bersifat kontradiktif?

1.3 FOKUS / LINGKUP PENELITIAN

- Fokus Penelitian
Kajian tatanan fisik lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman etnis di tepi Sungai Musi terhadap aspek legal (peraturan pemerintah mengenai Garis Sempadan Sungai) dan aspek tradisi (peraturan masyarakat yang diwariskan turun-temurun).
- Lingkup Penelitian
Penelitian dilakukan terhadap tatanan fisik lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman tepi Sungai Musi ditinjau dari aspek *power*, *program*, *text*, dan *place* (Kim Dovey) sebagai cerminan konsep pemikiran masyarakat di tepi Sungai Musi.

1.4 TESA KERJA

Penataan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi didasarkan pada dua aspek yaitu aspek legal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Garis Sempadan Sungai) dan aspek tradisi (peraturan dan tradisi turun-temurun masyarakat tepi sungai) yang keduanya bersifat kontradiktif.

Peraturan Garis Sempadan Sungai yang berlaku merata pada setiap sungai di Indonesia akan menghilangkan tradisi bermukim masyarakat tepi sungai, khususnya di tepi Sungai Musi.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

- Mendeskripsikan konsep pemikiran masyarakat etnis di tepi Sungai Musi yang menjadi tradisi dalam membentuk tatanan huniannya.
- Mengeksplorasi dan mengkaji tatanan hunian yang terbentuk pada kawasan permukiman di tepi Sungai Musi terhadap aspek legal (peraturan formal dan tradisi masyarakat).
- Mengkaji aspek-aspek tata ruang dan bangunan kawasan permukiman agar dapat menjadi dasar merumuskan peraturan perumahan dan permukiman yang menjaga kelanjutan sistem sosial-budaya lokal di kawasan tepi sungai, khususnya di tepi Sungai Musi.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan tentang konsep pemikiran dan tradisi masyarakat di tepi Sungai Musi yang menjadi aturan-aturan dalam mengembangkan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi. Aturan-aturan tersebut kemudian direpresentasikan pada tatanan lingkungan dan bangunan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi.

- Kontribusi Penelitian

Memperkaya pengetahuan di bidang arsitektur mengenai sistem penataan lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman di tepi sungai, khususnya di tepi Sungai Musi ditinjau dari aspek legal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pedoman dalam merumuskan peraturan tata ruang dan bangunan pada kawasan permukiman di tepi sungai di Indonesia, khususnya di tepi Sungai Musi.

1.7 RUJUKAN TERHADAP PENELITIAN YANG PERNAH DILAKUKAN

Beberapa penelitian arsitektur mengenai kawasan permukiman di tepi sungai sudah pernah dilakukan. Beberapa contoh penelitian tersebut antara lain :

No	Judul & Penulis	Kontribusi untuk Penelitian ini
1.	<p>Pengaturan Zonasi Penggunaan Lahan di Kawasan Tepian DAS Kahayan. (2007)</p> <p>Penulis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linda Mayona, MT. - Zulfadly Urufi, M.Eng. - Ridwandoni, ST. 	<p>Memberikan gambaran mengenai pengaturan zonasi penggunaan lahan kawasan Tepian DAS Kahayan untuk mengurangi dampak bencana banjir. Klasifikasi zona didasarkan pada kondisi guna lahan saat ini, dan rencana tata ruang kawasan.</p>
2.	<p>Permukiman Tepi Sungai di Kota Palembang : Studi Bentuk Permukiman, Tata Letak dan Tata Guna Ruang Serta Lingkungan.</p> <p>Penulis : Eka Asih Putrina Taim.</p>	<p>Memberikan informasi bahwa selain karena urbanisasi, kepadatan permukiman di tepi Sungai Musi disebabkan oleh kebiasaan penduduk tinggal dengan sanak keluarga, dan menyewakannya kepada para pendatang.</p>
3.	<p>Optimasi Potensi Artefak Budaya Pada Koridor Sungai Musi Untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Palembang.</p> <p>Penulis : Dr. Ir. H. A. Tutut Subadyo, MSIL.</p>	<p>Menjelaskan pentingnya pelestarian lansekap artefak budaya di kawasan tepi Sungai Musi untuk pengembangan kawasan wisata budaya sebagai upaya penghargaan terhadap sejarah Kota Palembang. Pelestarian ini meliputi struktur hunian permukiman di tepi Sungai Musi yang mencerminkan kehidupan masyarakat tepi sungai, juga peran Sungai Musi sebagai urat nadi kota Palembang baik secara kultural, fisik maupun sosio ekonomi.</p>

4.	Kajian Manifestasi Kekuasaan dalam Arsitektur. (2006) Penulis : Imam Faisal Pane	Memberikan pandangan adanya pengaruh kekuasaan dan politik terhadap suatu bentuk arsitektur, dan bagaimana masyarakat dapat menerima hal tersebut.
5.	Rumah Limas dan Struktur Pemikiran Orang Palembang. (2000) Penulis : Dadang Hikmah Purnama	Memperkaya pengetahuan tentang orientasi arah dan letak, bentuk, serta organisasi ruang di dalam rumah limas terkait dengan struktur pemikiran masyarakat orang Palembang.

Tabel 1. Rujukan penelitian yang telah dilakukan

1.8 Posisi Penelitian

Penelitian tentang permukiman di tepi sungai khususnya yang berada di tepi Sungai Musi telah banyak dilakukan, baik itu ditinjau dari aspek arsitektur, sejarah, konstruksi, bahkan hingga aspek antropologi. Namun, penelitian ini lebih ditekankan pada kawasan permukiman di tepi Sungai Musi sebagai representasi dari aspek legal (peraturan formal dan tradisi masyarakat). Untuk menghadapi tantangan modernisasi Kota Palembang, kawasan permukiman di tepi Sungai Musi memerlukan aspek legal agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Peraturan formal yang diberlakukan pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakatnya, termasuk menjaga kelanjutan sistem sosial-budaya lokal.

1.9 Penentuan Kasus Studi

Penentuan kasus studi pada penelitian ini difokuskan pada kawasan permukiman tepi sungai dengan kriteria sebagai berikut :

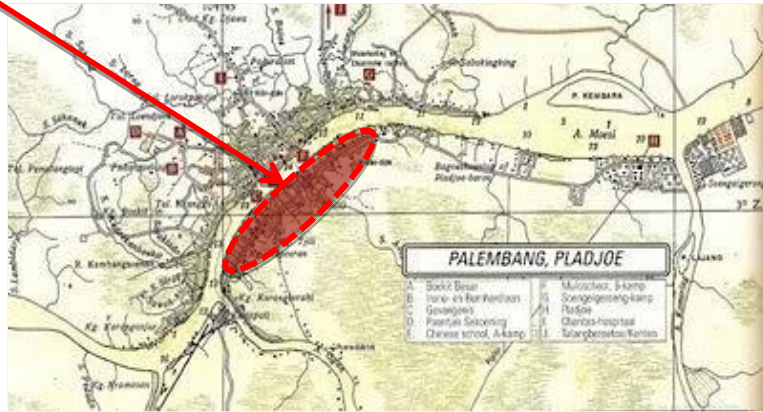
- Kawasan permukiman tepi sungai di wilayah perkotaan.
- Pola aktifitas dan perilaku sehari-hari penghuni kawasan permukiman masih berorientasi terhadap sungai.
- Merupakan kawasan permukiman dengan memiliki nilai historis yang berdiri sejak masa pemerintahan Pra-Kolonial dan masih bertahan hingga saat ini.
- Kawasan permukiman terbentuk oleh aspek legal, baik itu peraturan formal (eksternal), maupun tradisi masyarakat (internal).

Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, kawasan permukiman yang sesuai menjadi obyek penelitian adalah kawasan permukiman di tepi Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi yang strategis di tepi Sungai Musi sebagai pusat Kota Palembang, kawasan permukiman ini dihadapkan pada tantangan pembangunan berkelanjutan sebagai dampak modernisasi kota. Di sisi lain, kawasan bersejarah ini menyimpan nilai luhur budaya lokal yang patut dilestarikan.

Terbentuknya kampung-kampung etnis seperti Kampung Kapitan (dihuni oleh masyarakat etnis Tiong Hoa), Kampung Assegaf dan Kampung Al-Munawar (dihuni oleh masyarakat etnis Arab), dan Kampung Melayu (dihuni oleh masyarakat Melayu Palembang) merupakan bukti adanya campur tangan pihak penguasa dalam menentukan tatanan kawasan permukimannya. Pengaturan zonasi yang dilakukan pada masa Kesultanan Palembang ini masih bertahan hingga saat ini. Kampung etnis yang dipilih antara lain Kampung Kapitan, Kampung Al-Munawar, dan Kampung Melayu. Kampung Assegaf tidak termasuk ke dalam obyek penelitian dikarenakan tatanan lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman ini sudah mengalami transformasi pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Ketiga kampung etnis ini dapat mewakili kawasan permukiman lainnya yang tersebar di tepi Sungai Musi.



Srivijaya Empire
Around X to XI century



Kampung Melayu



Kampung Kapitan



Kampung Al-Munawar

Berikut ini beberapa foto yang memperlihatkan bentuk fisik dari kawasan permukiman di tepi Sungai Musi yang menjadi objek penelitian :



Gambar 6. Kampung Kapitan
Sumber www.fotografer.net



Gambar 7. Rumah Sang Kapitan
Sumber traveldetik.com



Gambar 8. Kampung Arab
Sumber damarati.blogspot.com



Gambar 9. Kampung Assegaf
Sumber kotapalembang.blogspot.com



Gambar 10. Kampung Melayu
Sumber www.blogspot.com



Gambar 11. Kampung Melayu
Sumber. travel.detik.com

1.10 KERANGKA PEMIKIRAN

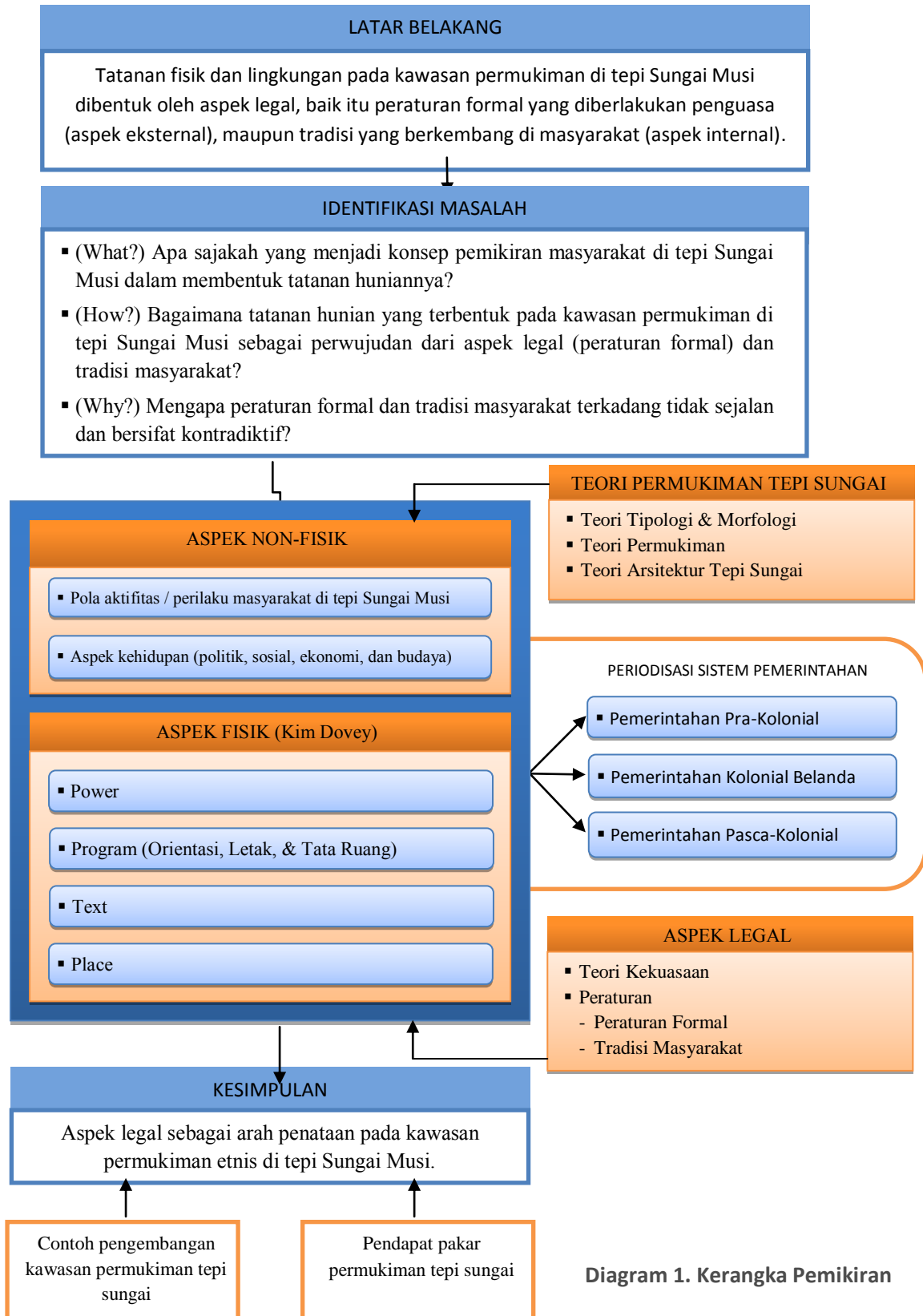


Diagram 1. Kerangka Pemikiran

1.11 Kerangka Penelitian

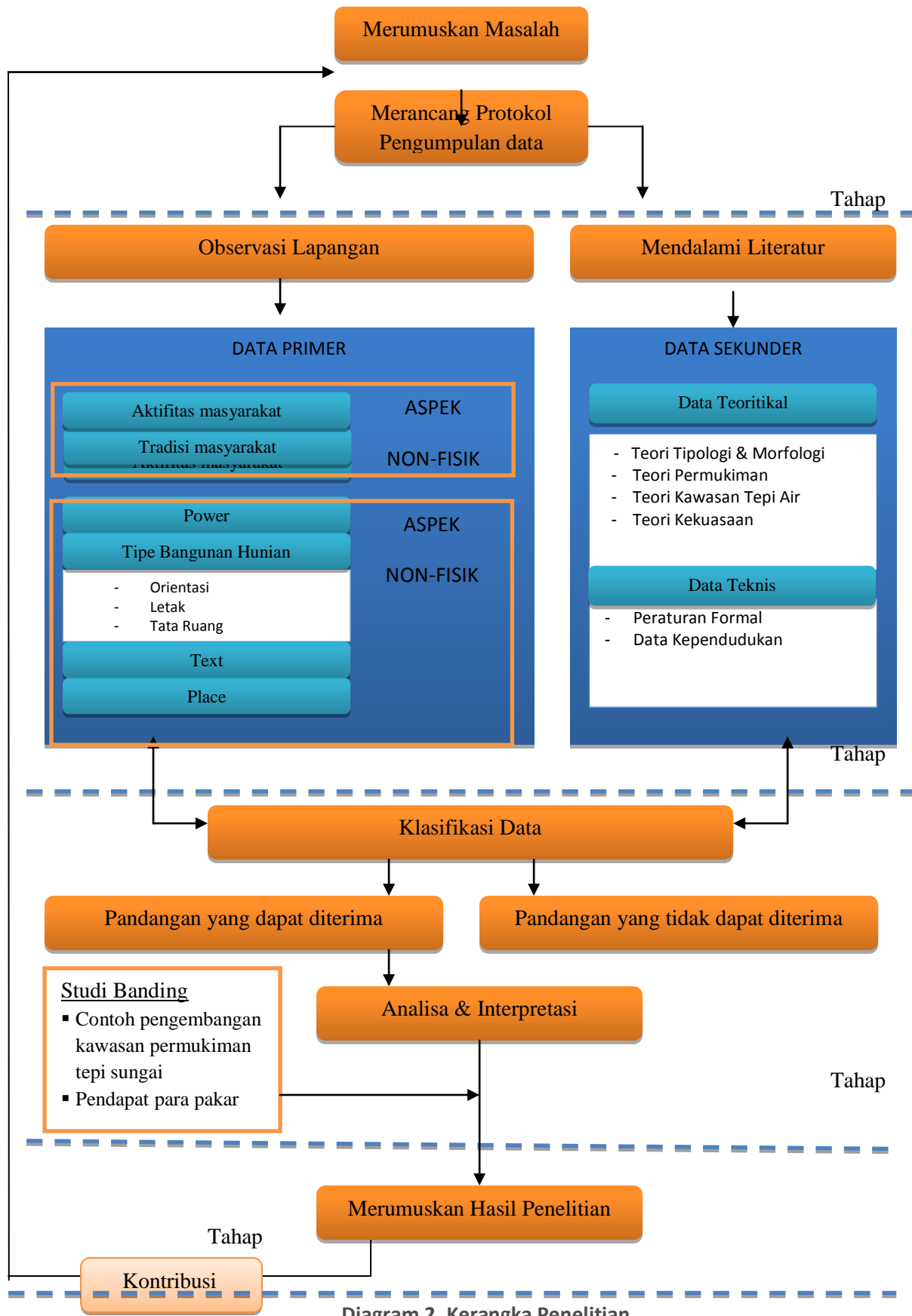


Diagram 2. Kerangka Penelitian

1.12 METODE DAN LANGKAH PENELITIAN

- Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode penelitian melalui pemeriksaan longitudinal secara mendalam terhadap suatu fenomena yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan. Dalam penelitian studi kasus dilakukan penelaahan empiris untuk menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Sebagai kasus, obyek harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem dibatasi yang terikat pada tempat dan kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metoda yang tidak sekedar menjelaskan seperti apa (what?) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif untuk menjelaskan bagaimana (how?) dan mengapa (why?) obyek tersebut dapat terjadi dan dapat dipandang sebagai suatu kasus.

Kekhususan penelitian studi kasus adalah pada sifat obyek yang diteliti. Menurut Robert K. Yin (2008), kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian studi kasus pada awalnya bertujuan untuk mengambil *lesson learned* yang terdapat dibalik perubahan yang ada, tetapi banyak penelitian studi kasus yang ternyata mampu menunjukkan adanya perbedaan yang dapat mematahkan teori-teori yang telah mapan, atau menghasilkan teori dan kebenaran yang baru. Posisi teori yang dibangun dalam penelitian studi kasus dapat sekedar bersifat memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan teori yang ada berdasarkan perkembangan dan perubahan fakta terkini. Sedangkan posisi pemanfaatan teori yang telah ada di dalam penelitian studi kasus dimaksudkan untuk menentukan arah dan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi kasus adalah tatanan lingkungan dan bangunan pada kawasan permukiman di Sungai Musi. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kondisi kawasan permukiman tersebut, tetapi juga untuk mengkaji proses pembentukannya sebagai hasil dari penerapan aturan-

aturan yang terbentuk menjadi tradisi di masyarakat (faktor internal) dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pihak penguasa (faktor eksternal).

- Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua kelompok, yaitu data primer yang berisi informasi mengenai data empiris mengenai fenomena yang terjadi kawasan permukiman di tepi Sungai Musi, khususnya pada tiga kampung etnis terpilih, dan data sekunder yang berisi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data primer berupa pengamatan pada tiga kampung terpilih, pengambilan foto, pemetaan situasi di lapangan, dan wawancara secara mendalam kepada tokoh-tokoh yang dianggap dapat memberikan informasi secara rinci. Pengamatan difokuskan pada orientasi, letak, dan tata ruang bangunan. Pengamatan juga diarahkan pada pola-pola dan variasi tata ruang dan bentuk bangunan yang ada pada ketiga kampung etnis terpilih. Sedangkan wawancara secara mendalam ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai konsep pemikiran masyarakat mengenai Pancalang Lima dan Batanghari Sembilan yang difokuskan pada dua hal, yaitu peran sungai dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruhnya terhadap pembentukan rumah tinggal dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan wawancara digunakan pedoman wawancara sebagai panduan agar peneliti tidak keluar dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Namun, wawancara juga bersifat fleksibel agar informan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap pertanyaan yang diajukan.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel, jurnal, maupun dokumen sejarah. Data sekunder berisi studi literatur terdiri dari teori-teori yang relevan dengan kawasan permukiman khususnya yang berada di tepi sungai, baik itu yang berkaitan dengan tatanan fisiknya, kegiatan bermukim masyarakat tepi sungai, dan peran peraturan sebagai faktor kontrol dan kendali. Secara umum, teori yang dipakai adalah teori tipologi dan morfologi (sebagai alat untuk mengidentifikasi kawasan permukiman), teori tentang kawasan permukiman, teori arsitektur tepi air, teori kekuasaan, dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah.

- Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap konseptualisasi, tahap eksplorasi, tahap analisis dan interpretasi, dan tahap kesimpulan. Pada tahap konseptualisasi dilakukan pengamatan awal dan merumuskan permasalahan mengenai fenomena yang terjadi pada kawasan permukiman tepi sungai, khususnya pada tiga kampung etnis di tepi Sungai Musi. Pada tahap ini ditentukan juga yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu identifikasi kawasan permukiman etnis di tepi Sungai Musi yang ditinjau terhadap aspek legal. Dengan demikian dapat disusun protokol untuk pengumpulan data dan jalannya penelitian.

Tahap kedua adalah tahap eksplorasi, dimana pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data primer dan sekunder berdasarkan protokol penelitian yang telah disusun. Data primer yang dicari berkaitan dengan pola aktifitas dan perilaku masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Musi pada tiga kampung etnis terpilih yaitu, Kampung Kapitan, Kampung al-Munawar, dan Kampung Melayu. Pengamatan pola aktifitas dan perilaku masyarakat diperluas pada tatanan hunian dan lingkungannya yang terbentuk. Data dikumpulkan sebanyak-banyaknya namun tetap pada jalur penelitian. Data-data yang telah terkumpul kemudian akan disaring dan diklasifikasi pada tahap berikutnya.

Tahap ketiga merupakan tahap analisis, dimana data primer yang sudah diperoleh disaring dan diklasifikasikan. Data yang terpilih kemudian ditinjau kembali melalui wawancara kepada informan agar data yang diperoleh dapat terbukti kebenarannya. Data primer berupa pola aktifitas dan perilaku masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Musi pada tiga kampung etnis terpilih kemudian dianalisis dan interpretasi terhadap data sekunder, baik itu data teoritikal maupun data teknis.

Tahap keempat merupakan tahap terakhir penelitian ini, yaitu tahap kesimpulan. Pada tahap ini diperoleh hasil penelitian berupa kesimpulan hasil dari analisa dan interpretasi data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi terhadap sistem penataan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi terutama pada aspek legal.

BAB II KAJIAN TEORITIK

2.1. KEKUATAN POLITIK PEMERINTAHAN DALAM ARSITEKTUR

Terbentuknya wujud fisik kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh kegiatan bermukim dengan berbagai aspek sosial yang melatarbelakanginya. Berbagai teori menjadi dasar pemikiran dalam penataan fisik lingkungan dan bangunan di tepi sungai. Tidak terbatas pada teori arsitektural, teori sosial juga berperan untuk menemukan kaitan antara lingkungan binaan dengan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Dalam mengkaji aspek arsitektural kawasan permukiman di tepi sungai diperlukan teori-teori yang berkaitan dengan arsitektur tepi sungai agar dapat diketahui kriteria kawasan tepi sungai tersebut untuk merumuskan indikator desain *riverfront*. Sebagai contoh, indikator desain *riverfront* dapat meliputi fungsi kawasan, pola jalan, struktur ruang, pola masa bangunan, hubungan air dan darat, arah orientasi bangunan, fungsi ruang terbuka, pola *skyline* kawasan, dan estetika fasade.

Teori sosial digunakan sebagai pendukung teori arsitektural sebab dalam proses pembentukannya, sebuah lingkungan binaan tidak terlepas dari fenomena sosial yang melatarbelakanginya. Pada makalah ini, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah aspek kekuatan politik dalam konteks sosial.

Kajian mengenai kekuatan politik tidak terlepas dari kekuasaan. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial memiliki nilai-nilai normatif dalam hidupnya. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki hasrat dan keinginan yang belum tentu sama dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia juga hidup berdampingan dengan manusia lainnya membentuk suatu masyarakat yang guyub dengan berbagai nilai-nilai sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah kekuasaan. Kekuasaan dapat memunculkan berbagai struktur sosial masyarakat yang diatur melalui politik sebagai aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Foucault melihat kekuasaan sebagai pemaksaan kehendak dari seseorang terhadap kelompok lain. Kekuasaan juga merupakan strategi yang sangat kompleks dengan manuver dan mekanisme tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Kekuasaan yang berhubungan dengan kehendak harus dibatasi oleh sistem politik /

pemerintahan agar tidak digunakan sewenang-wenang.

Kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (Depdiknas 2001 : 604). Kekuasaan dari orang untuk menguasai orang lain merupakan hubungan timbal balik. Kekuasaan akan tetap eksis apabila orang yang dikuasainya merasa nyaman dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Kekuasaan tidak dapat ditempatkan atau dilokalisir, kekuasaan merupakan sebuah tatanan disiplin, produktif, dan tidak represif.

Sedangkan politik didefinisikan sebagai sesuatu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan. Politik juga dapat mengandung arti segala urusan dan tindakan (kebijakan) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (Depdiknas 2001 : 886). Politik berkaitan erat dengan keteraturan dan ketertiban yang dapat terwujud melalui perangkat kebijakan yang menyeluruh. Di dalam teori politik ada konsep-konsep yang dianggap penting, yaitu masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, perubahan sosial, dan sebagainya (Budiarjo 1992 : 30). Konsep yang paling banyak disinggung adalah masyarakat, sebab politik tidak akan eksis jika tidak diakui oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari dinamika bermasyarakat, kekuasaan merasuki berbagai bidang kehidupan termasuk arsitektur. Di dalam bidang arsitektur, kekuasaan dan politik dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Di dalam bidang arsitektur, kebijakan-kebijakan ini berperan untuk menciptakan suatu tatanan yang serasi, selaras, dan seimbang tentang ruang (*space*) dan tempat (*place*) baik itu milik perorangan, kelompok, maupun milik bersama. Kebijakan ini akan semakin nyata ketika cakupannya semakin luas. Contohnya kebijakan mengenai tata ruang di kota akan lebih jelas dan lugas dibandingkan kebijakan di desa. Tentu saja kebijakan ini dibuat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar anggota masyarakat.

Kim Dovey, seorang teoritikus arsitektur menelaah teori tentang kekuasaan dari sudut pandang arsitektur. Fenomena yang melingkupi dalam dunia arsitektur ditelaah melalui pandangannya mengenai kekuasaan. Menurut Kim Dovey, *power* atau kekuasaan merupakan mediator bagi terbentuknya lingkungan binaan. Kim

Dovey mencoba untuk menelusuri lebih dalam pengertian mengenai *power*, yang secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengontrol terhadap yang lainnya untuk mencapai akhir. Dalam menganalisa *power*, Kim Dovey menjelaskan bentuk dasar dari teorinya yang membingkai pengertian *power* secara luas, yaitu :

- *Power*

Kim Dovey menyebutkan bahwa lingkungan binaan dibingkai oleh pola-pola dari *power* atau kekuasaan. *Power* berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memegang kendali *power* / kuasa tersebut.

- *Program*

Selain *power*, Kim Dovey melihat pentingnya program ruang yang menentukan bentuk bangunan terhadap status pada kehidupan sosial. *Power* yang terdapat dalam struktur sosial dapat berperan dalam pemrograman ruang, sehingga hierarki ruang yang merupakan representasi kekuasaan dapat menciptakan arsitektur dengan pendekatan terhadap kekuasaan.

- *Text*

Text dimaksudkan untuk memperlakukan arsitektur sebagai *spatial text*, yaitu komponen arsitektural yang dapat dibaca sebagai sebuah sistem komunikasi. *Text* dalam arsitektur melibatkan hubungannya dengan *power* sejak subjek dibentuk berdasarkan keinginan. Bentuk dari wacana dan representasinya merupakan gagasan konsepsi untuk memperlihatkan kenyataan dalam tatanan sosial.

- *Place*

Dalam kajian terhadap *place*, Kim Dovey melihat bahwa *power* berperan didalam pengalaman tempat yang dimiliki oleh individu, sehingga karakter tempat yang berbeda dapat dipicu oleh kekuasaan yang berbeda pula sebab *inner vision* seseorang bergantung kepada *power* yang dimilikinya.

Masyarakat Indonesia sudah mengenal kehidupan berpolitik sejak masa berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Saat itu, pihak kerajaan sudah menerapkan sistem politik di berbagai aspek kehidupan untuk mengatur kehidupan rakyatnya.

Pihak kerajaan berperan sangat dominan terhadap pengendalian rakyatnya.

Di dalam bidang arsitektur, kekuasaan (*power*) berperan untuk mengatur penataan fisik ruang dan bangunan yang terdapat di dalam suatu wilayah. Pengaturan ruang berdasarkan zona (*program*) didasarkan atas strata sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, untuk kalangan bangsawan dan masyarakat elit ditempatkan pada dataran yang lebih tinggi dibandingkan untuk kalangan masyarakat biasa. Lingkungan binaan sebagai sebuah objek arsitektur tentu merepresentasikan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Melalui elemen-elemen fisiknya, sebuah lingkungan binaan menjadi media yang mengkomunikasikan (*text*) berbagai aspek sosial yang menjadi latar belakang penciptaan objek arsitektur tersebut. Latar belakang tersebut secara tidak langsung memberikan warna khas yang menjadi identitas suatu wilayah. Hal inilah yang menciptakan suatu pengalaman yang berbeda pada setiap tempat (*place*).

Terciptanya kawasan permukiman di tepi sungai tidak terlepas dari adanya peran kekuasaan untuk mewujudkan tatanan fisik lingkungan dan bangunan. Dalam mengkaji kawasan permukiman di tepi sungai, teori arsitektur beserta indikator desain *riverfront* menjadi alat untuk mengelaborasi wujud fisik lingkungan dan bangunan. Melalui empat elemen yang dicetuskan oleh Kim Dovey, hasil elaborasi tersebut dapat ditelaah bagaimana manifestasi kekuasaan di dalam arsitektur. Secara umum, pendekatan teori dapat diilustrasikan pada diagram berikut ini :

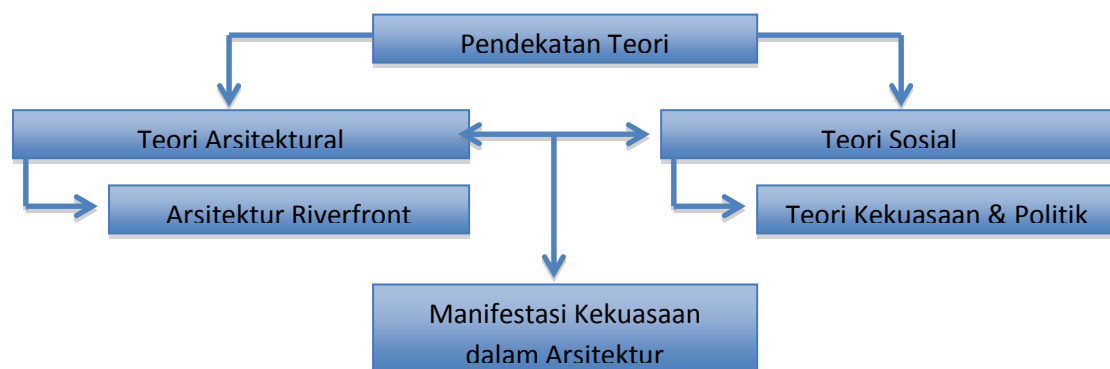


Diagram 2.1 Hubungan Teori Arsitektur dan Teori

2.2 GAMBARAN UMUM KOTA SUNGAI PALEMBANG SEBAGAI CONTOH OBJEK AMATAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota sungai di Indonesia yang lahir dari berkembangnya permukiman di kawasan tepi sungai, yaitu Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Saat ini proses bermukim di tepi sungai masih dapat ditemukan, hal ini ditandai dengan kawasan permukiman tepi sungai yang masih eksis dan terus berkembang. Sungai masih berperan dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di bidang ekonomi, industri, dan transportasi baik dalam skala kecil maupun besar. Berkembangnya industri rumah tangga di bidang kuliner yang bahan bakunya berasal dari ikan sungai seperti pempek dan kemplang menjadi contoh bahwa sungai masih berperan bagi masyarakat.

Kawasan pemukiman di tepi Sungai Musi merupakan kawasan warisan budaya yang patut dilestarikan. Di dalam situs pemerintah Kota Palembang disebutkan bahwa kawasan pemukiman seperti Kampung Kapitan dan Kampung Arab merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Kota Palembang. Kekayaan ini menjadi salah satu potensi yang dimiliki Kota Palembang untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai Kota Sungai seperti yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, karakteristik Sungai Musi yang lebar sangat sesuai sebagai sarana transportasi yang mendukung kegiatan pelabuhan dan perdagangan. Sungai Musi dan anak sungainya menjadi sarana transportasi utama yang menghubungkan antar wilayah, bukan sebagai pembelah tetapi menjadi pemersatu kawasan Ulu dan Ilir Kota Palembang.

Kawasan permukiman di tepi Sungai Musi dan anak-anak sungainya merupakan produk dari kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa. Sejak awal munculnya permukiman di kawasan tepi Sungai Musi, perkembangan Kota Palembang telah mengalami pergantian berbagai bentuk pemerintahan yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu pemerintahan masa Pra-Kolonial, masa pendudukan Kolonial Belanda, dan masa Pasca-Kolonial. Setiap periode memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diterbitkan pada periode tersebut yang berpengaruh pada bentukan arsitekturnya.

Uraian berikut ini akan menjelaskan fenomena perkembangan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi pada setiap periode.

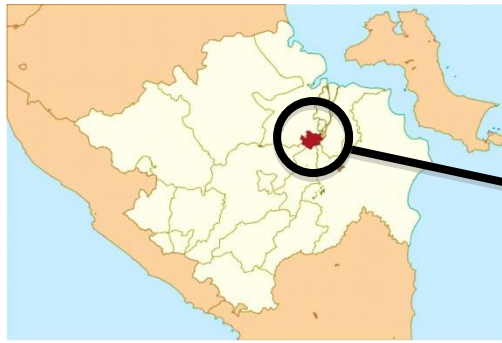
2.2.1 Kota Palembang pada masa Pra-Kolonial

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, permukiman merupakan suatu lembaga persekutuan di mana *patronage* dan *paternalis* terbentuk akibat struktur masyarakat tradisional dan feodalistis. Keseluruhan sistem ini berada dalam satu lingkungan dan lokasi. Sistem ini dikenal dengan nama guguk. Setiap guguk mempunyai sifat sektoral ataupun aspiran. Sekedar untuk pengertian meskipun tidak sama, bentuk guguk (lembaga *patronage*) ini dapat dilihat dengan sistem *gilda* pada abad pertengahan di Eropa. Pengelompokan guguk ini dibedakan berdasarkan sektor usaha, berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan di masyarakat, dan berdasarkan fungsinya.

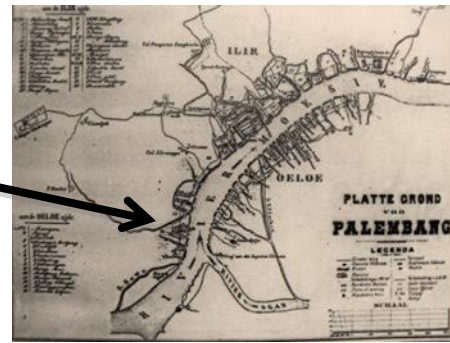
Kebijakan mengenai kawasan permukiman juga didasarkan pada zona menurut status sosial masyarakatnya. Para pemimpin ditempatkan pada dataran tinggi dan bangunannya dikelilingi oleh kanal yang terhubung dengan Sungai Musi dan anak sungainya. Sedangkan masyarakat biasa tinggal di rumah rakit yang mengapung di Sungai Musi. Gambar berikut ini memperlihatkan peta wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan lokasi Kota Palembang sebagai pusat kerajaan terhadap Sungai Musi.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya
Sumber budayabahari05.tripod.com



Gambar 2.2 Peta Inset Kota Palembang
Sumber ms.wikipedia.org



Gambar 2.3 Peta Inset Sungai Musi
Sumber kotapalembang.blogspot.com

Pada masa Kesultanan Palembang yaitu setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, pembangunan modern banyak dilakukan, diantaranya membangun pusat kerajaan di tepi Sungai Musi dengan mengadopsi bentuk keraton dari Jawa, yaitu Keraton Kuto Batu, Keraton Kuto Besak, Masjid Agung Palembang, dan pembangunan sistem kanal sebagai jalur pelayaran, pertanian, dan pertahanan.

Untuk kawasan pemukiman, Kesultanan Palembang mengelompokkannya berdasarkan etnis, status sosial, ekonomi, keagamaan, dan kedudukan dalam pemerintahan. Masyarakat elit dan kerabat kesultanan ditempatkan pada dataran tinggi di daerah ilir. Sedangkan kaum pendatang seperti masyarakat Cina, Arab dan Persia membaaur dengan masyarakat asli Palembang yang kebanyakan berasal dari ras Melayu. Kaum pendatang ini membentuk komunitas masing-masing, tinggal bersama dalam suatu wilayah dan mendirikan kampung di tepi Sungai Musi. Akulturasi budaya terlihat pula pada bangunan rumah tinggalnya. Berbagai ornamen yang kental akan budaya etnis tertentu menyatu dengan bentuk rumah limasan sebagai bentuk rumah masyarakat asli Palembang. Berikut ini foto beberapa bangunan rumah tinggal masyarakat etnis Cina, Arab, dan Melayu di tepi Sungai Musi.



Gambar 2.4 Kampung Kapitan
Sumber www.blogspot.com



Gambar 2.5 Kampung Arab
Sumber www.blogspot.com



Gambar 2.6 Kampung Melayu
Sumber www.blogspot.com

2.2.2 Kota Palembang pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, kebijakan mengenai kawasan pemukiman yang zonasinya dikelompokkan berdasarkan etnis masih tetap diberlakukan. Kawasan pemukiman penduduk yang sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang seperti Kampung Kapitan, Kampung Arab, dan Kampung penduduk asli Palembang masih tetap dipertahankan di Tepi Sungai Musi. Sedangkan kawasan pemukiman baru dikembangkan pemerintah Hindia-Belanda di dataran yang lebih tinggi dengan mengadopsi konsep kota taman, dengan ciri khas bangunan yang dikelilingi oleh halaman luas.

Namun demikian, sistem wilayah guguk yang sudah ada sebelumnya dipecah belah menjadi beberapa kampung yang lebih kecil. Tujuannya adalah selain untuk memecah kekuatan Kesultanan Palembang juga memecah-belah masyarakat yang tadinya tunduk pada sistem kesultanan menjadi tunduk pada administrasi Belanda. Selain memecah guguk, pemerintah Kolonial Belanda juga secara tegas membagi dua wilayah administratif Kota Palembang menjadi wilayah Sebrang Ulu dan Sebrang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Masing-masing wilayah ini dipimpin oleh seorang Demang.

Pada awal pembagiannya, Kota Palembang terdiri dari 52 kampung. 16 kampung berada di Sebrang Ulu dan 36 kampung di Sebrang Ilir. Kampung-kampung ini diberi nomor. Nomor 1 sampai 36 Ilir untuk Sebrang Ilir, dan 1 sampai 16 Ulu untuk Sebrang Ulu. Namun, pada tahun 1939 jumlah kampung menyusut menjadi 43 buah, yakni 29 kampung berada di Sebrang Ilir dan 14 kampung berada di Sebrang Ulu. Beberapa kampung yang jumlah jiwanya sedikit digabung dan dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Kepala Kampung hanya mengurus

penduduk pribumi, sedangkan untuk golongan orang Timur Asing, mereka mempunyai kepala dan *wijk* tersendiri.

Untuk golongan Cina, golongan Arab dan Keling (India/Pakistan), kepala-nya diangkat dengan kedudukan seperti kepangkatan militer, yaitu Letnan, Kapten dan Mayor. Mereka biasanya dipilih berdasarkan atas pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan diserahkan bagi pemerintah disertai pula jaminan dana bagi kedudukannya.

Pemerintah Kota Palembang pada 1 April 1906 menjadi satu *Stadgemeente*, yakni satu pemerintahan kota yang otonom, di mana dewan kota yang mengatur pemerintahan. Penduduk menyebut pemerintah kota ini adalah *Haminte*. Ketua Dewan Kota adalah *Burgemeester* (Walikota) yang dipilih oleh anggota Dewan Kota. Anggota Dewan Kota dipilih oleh penduduk kota. Sebenarnya pemerintah kota bukanlah dibentuk untuk tujuan utama memenuhi kepentingan pribumi, akan tetapi lebih kepada kepentingan para pengusaha Barat.

Pemerintah Kolonial Belanda juga banyak melakukan pembangunan modern di wilayah tepi Sungai Musi. Dari peta berikut ini dapat terlihat kawasan tepi Sungai Musi semakin lengkap dengan didirikannya berbagai bangunan penting.



Gambar 2.7 Peta Wisata Kota Palembang
Sumber www.metropalembang.com

Keterangan :

Bangunan yang berada di sebelah Ulu Sungai Musi (Sisi Utara)



Gambar 2.8 Masjid Lawang Kidul
Sumber bulletinmetropolis.com



Gambar 2.9 Pasar Tradisional 16 Ilir
Sumber bp.blogspot.com



Gambar 2.10 Masjid Agung Palembang
Sumber www.travelonfoto.com



Gambar 2.11 Benteng Kuto Besak
Sumber bp.blogspot.com

Bangunan yang berada di sebelah Ilir Sungai Musi (Sisi Selatan)



Gambar 2.12 Kompleks Makam Bagus Kuning
Sumber www.aboutpalembang.com



Gambar 2.13 Warung Legenda
Sumber photos.wikimapia.org

2.3 KOTA PALEMBANG PADA MASA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, penduduk setempat masih menerapkan aturan mengenai kependudukan yang diwariskan dari masa lalu. Rumah-rumah penduduk dengan ornamennya yang kental akan budaya etnis tertentu menunjukkan bahwa pengelompokan kawasan pemukiman berdasarkan etnis masih diterapkan. Namun, derasnya arus urbanisasi membuat permukiman penduduk di tepi Sungai Musi menjadi semakin padat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin kompleks hubungan sosial yang ada, serta berubahnya kondisi lingkungan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat untuk berinteraksi baik antar masyarakat, maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Saat ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur pertumbuhan dan perkembangan kawasan pemukiman di tepi sungai. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih terfokus pada pembangunan di wilayah daratan. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan yang dibuat untuk menata ruang fisik dan bangunan di wilayah daratan. Beberapa contoh dari peraturan tersebut antara lain: penetapan garis sempadan bangunan, penentuan koefisien dasar bangunan, penentuan koefisien luas bangunan, pembagian zonasi wilayah kota atas fungsi (wisma, karya, suka, dan marga).

Sedangkan peraturan mengenai penataan fisik ruang dan bangunan di wilayah tepi sungai secara umum hanya dirumuskan pada penetapan garis sempadan sungai yang berlaku secara merata. Peraturan lain yang berkenaan dengan ruang sungai lebih menitikberatkan pada pelestarian sungai sebagai sumber daya alam. Kurangnya kebijakan yang mengatur pembangunan di sekitar tepi sungai mengakibatkan pertumbuhan menjadi tidak terkendali dan cenderung tidak teratur.



Gambar 2.14 Kawasan Pemukiman Padat
Sumber bp.blogspot.com



Gambar 2.15 Kawasan Permukiman Kumuh
Sumber bulletinmetropolis.com

Kebijakan mengenai tata ruang dan wilayah di sekitar sungai secara spesifik diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.” yang menyebutkan bahwa sungai adalah jalur atau wadah air alami dan / atau buatan berupa jaringan pengaliran air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kajian penetapan garis sempadan ini memuat hal-hal berikut

- Batas ruas sungai yang ditetapkan
- Letak garis sempadan
- Rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.

Menurut peraturan tersebut, bangunan yang terletak di dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan sempadan sungai, terkecuali untuk bangunan dengan kepentingan tertentu, seperti : bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, serta rentangan kabel listrik & telekomunikasi.

Kewenangan untuk menata daerah aliran Sungai Musi diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah Kota Palembang yang direalisasikan dengan kebijakan publik, yaitu rencana pembangunan kawasan reklamasi pada tepian Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Konsekuensinya, semua bangunan yang ada di tepi Sungai Musi termasuk bangunan penduduk harus ditertibkan / dibongkar. Secara spesifik Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang “Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan 7 Ulu dan Sekitarnya Kecamatan Seberang

Ulu Palembang” menyebutkan bahwa garis sempadan sungai di sepanjang Sungai Musi adalah 20 meter. Sehingga lahan di tepian Sungai Musi dalam jarak tertentu dijadikan sebagai kawasan reklamasi hijau, taman kota, sarana olahraga, pasar seni, cafeteria, dan sebagainya.

Padahal kawasan pemukiman tersebut sudah berdiri sejak masa Kesultanan Palembang dan sarat akan nilai perilaku masyarakat tepi sungai. Rumah rakit dan rumah panggung limasan yang berbatasan langsung dengan sungai merupakan tipologi bangunan rumah tinggal yang banyak didirikan di tepi Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Munculnya tipologi ini sebagai bentuk adaptasi kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat bergantung terhadap Sungai Musi sebagai sumber kehidupan dan sarana transportasi.



Gambar 2.16 Pemukiman di tepi S. Musi
Sumber havefuntrip.files.wordpress.com



Gambar 2.17 Pemukiman di tepi S. Musi
Sumber images.detik.com

Implementasi kebijakan pembangunan reklamasi yang semula dijadwalkan selesai dalam sepuluh tahun (1994-2004) rupanya hanya dapat diimplementasikan pada tepi Sungai Sekanak (anak Sungai Musi). Sedangkan pada kawasan tepi Sungai Musi belum dapat direalisasikan karena beberapa kendala, seperti faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi.



Gambar 2.18 Tepi Sungai Sekanak
Sumber bp.blogspot.com



Gambar 2.19 Tepi S. Sekanak reklamasi
Sumber bp3.blogger.com

Fungsi dari peraturan ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang umum terjadi di tepi sungai, yaitu munculnya *squatter* / bangunan liar yang terkesan kumuh dan menurunkan kualitas lingkungan di sekitar sungai. Namun, peraturan yang berlaku merata pada seluruh sungai di Indonesia ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Di satu sisi, kota-kota sungai di Indonesia memiliki *settlement* yang sudah lama berkembang di kawasan tepi sungai sebagai salah satu warisan turun-temurun peradaban leluhur. Di sisi lain, peraturan mengenai garis sempadan sungai menegaskan bahwa di sepanjang tepi sungai harus berupa ruang terbuka yang secara tidak langsung ingin menghilangkan tradisi bermukim di tepi sungai yang sudah eksis.

Dari perjalanan periode waktu dapat dilihat perkembangan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi. Sejak awal berdirinya di masa Kerajaan Sriwijaya hingga masa kini, ada beberapa hal yang tetap juga ada yang berubah. Permukiman di tepi Sungai Musi masih eksis karena ada aspek-aspek tertentu dalam arsitektur sebagai cerminan tradisi perilaku masyarakat tepi sungai yang tetap bertahan. Perjalanan sejarah memperlihatkan bahwa perkembangan kawasan permukiman di tepi Sungai Musi pada suatu periode didasarkan pada kontinuitas dari masa sebelumnya.

“Sejarah dianggap sebagai kemajuan, akumulasi pengalaman berharga yang berasal dari masa lalu untuk pengembangan masa depan masyarakat.” (Marc Angelil. 1989:69).

BAB III. METODE PENELITIAN

Proses penelitian akan dilakukan dengan metode berikut ini.

3.1. PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, survey, studi dokumen/ literatur, wawancara terstruktur kepada penentu kebijakan, pembangun dan pengguna kawasan.

1. Observasi merupakan suatu hasil usaha aktif yang dilakukan secara sistematis dan fokus dalam mengamati dan mencatat obyek studi/ fenomena / gejala-gejala fisik dll.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti (pewawancara) untuk mendapatkan informasi lisan. Teknik ini biasa dilakukan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan informasi kepada si peneliti (responden).

3.2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dilakukan sebagai berikut.

1. Studi literatur merupakan suatu proses pengkajian seluruh literatur, buku atau tulisan-tulisan, hasil penelitian sebelumnya, jurnal dan bentuk lain yang terkait dan yang sudah ada serta sah secara ilmiah sebagai acuan dan dasar pemikiran dalam proses penelitian.
2. Studi dokumen merupakan kegiatan pengkajian terhadap seluruh dokumen yang dapat menunjang keakuratan analisis dalam penelitian. Dokumen merupakan data yang dapat direkam dan atau disimpan untuk dimanfaatkan dalam proses analisis serta dapat menjadi wujud representasi simbolik dari suatu obyek / peristiwa. Pengumpulan dan perekaman dokumen dapat berupa hasil wawancara, pengamatan, teks dari literatur, gambar, foto situasi, sketsa, simbol, dan lainnya, bertujuan untuk memahami problem dari konteks tertentu.

3.3. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan sebagai berikut ini.

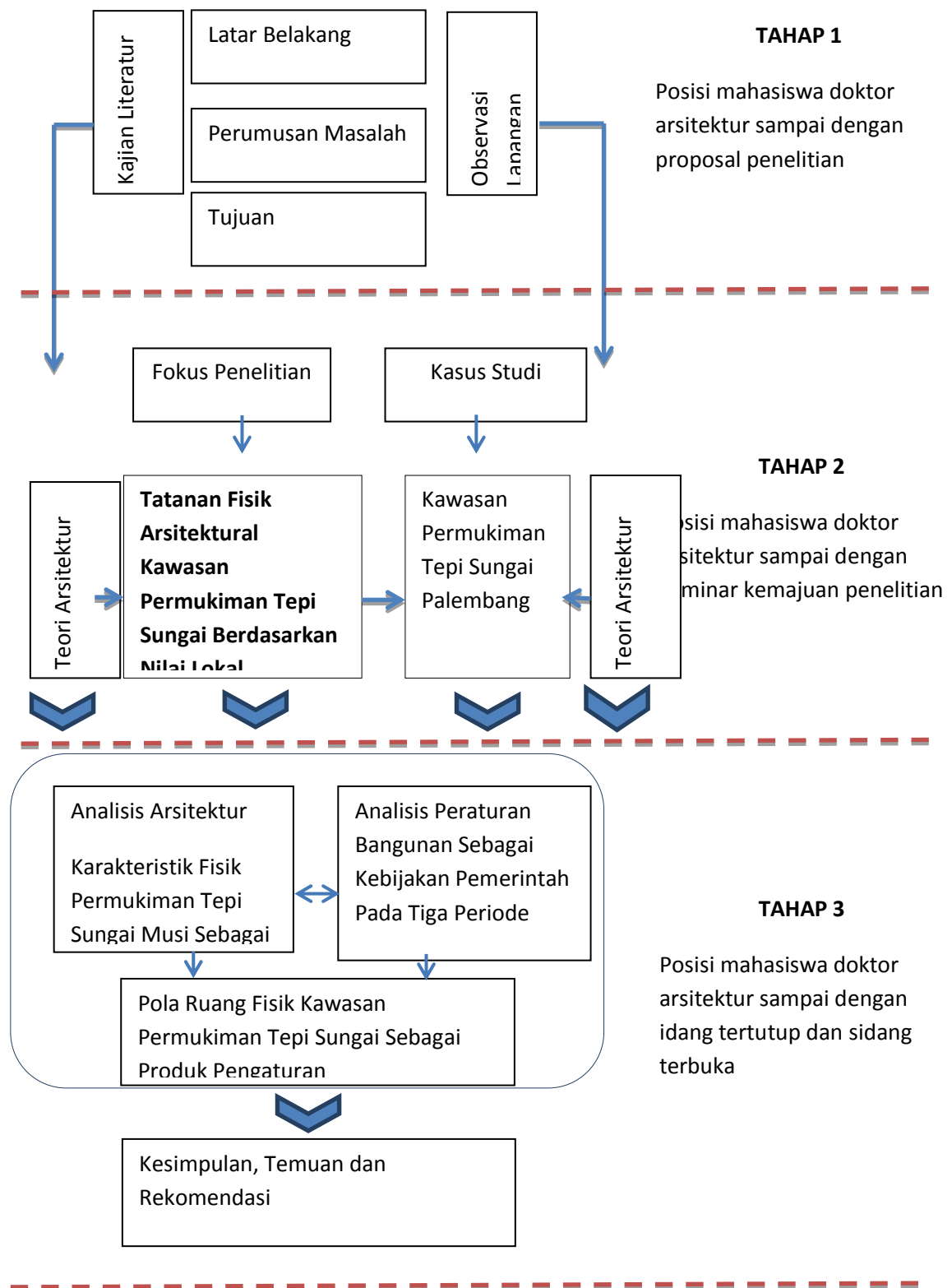
1. Klasifikasi dan dokumentasi data yaitu : Data yang telah dikumpulkan dipilah menjadi dua kelompok besar, yaitu data yang berkaitan dengan kualitas fisik arsitektural kawasan, data yang berkaitan dengan kondisi non fisik antara lain : peran serta pemerintah kota, masyarakat pembangun serta data yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat pengguna.
2. Analisis data adalah kegiatan suatu kajian yang dilaksanakan terhadap obyek studi sebagai kasus yang dipilih yaitu direncanakan permukiman tepi sungai Musi kota Palembang. Dengan tujuan meneliti berbagai kondisi yang dinyatakan sebagai variabel penelitian, dan dilakukan secara spesifik dan mendalam.
3. Dalam penelitian ini, analisis data direncanakan untuk dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi dari sudut pandang objektif terhadap bentukan kawasan fisik arsitektural kawasan permukiman tepi sungai berdasarkan keberadaan peraturan bangunan sebagai produk kebijakan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan positivistik.
4. Melalui analisis yang dilakukan diharapkan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dimunculkan.

3.4. PENARIKAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap seluruh data yang terkait, ditarik suatu kesimpulan sebagai temuan penelitian terhadap penataan fisik arsitektural kawasan permukiman tepi sungai Musi Palembang. Penarikan kesimpulan tersebut harus memenuhi kelogisan mengenai penelitian yang telah dilaksanakan, artinya secara khusus berlaku bagi kasus yang diteliti melalui hasil analisis yang didapat.

BAB IV. STATUS PENELITIAN

Pentahapan dan Posisi Mahasiswa Doktor Arsitektur



BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilakukan pada Tahun Kedua dari penelitian, sebagai lanjutan dari rencana penelitian 3 tahun, setelah melakukan analisis secara menyeluruh.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dilakukan pada Tahun ketiga dari seluruh penelitian disertasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka dan Salura, Purnama (2003). *Arsitektur dalam Bingkai Kebudayaan* : Architecture and Communication, Jakarta
- Adiyanto, Johannes. *Kampung Kapitan Interpretasi Jejak Perkembangan Permukiman dan Elemen Arsitektural* : Universitas Sriwijaya.
- Budiharjo, Eko (1994). *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, dan Perkotaan* : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dovey, Kim (1999). *Framing Places (Mediating Power in Built Form)* : Routledge, London and New York
- Foucault, Michel (2002). *Power / Knowledge* : Benteng Budaya, Yogyakarta
- Johnson, Paul Alan (1994). *The Theory of Architecture* : Van Nostrand Reinhold Company, New York. Page 269-282
- Koentjaraningrat (1980). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* : Djambatan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pane, Imam Faisal (2006). *Tesis Kajian Manifestasi Kekuasaan Dalam Arsitektur*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Rossi, Aldo (1982). *The Architecture of The City* : MIT Press, Cambridge. Page 161-163
- Siahaan, Uras (2008). *Desain Tepi Sungai* : Ombak, Yogyakarta. Page 111-180

Daftar Internet

- Anitashiva88. *Masa Penjajahan di Kota Palembang* : anitashiva88.blogdetik.com, Diunduh 7 November 2013. Jam 16.58
- Fourtofour, Aris (2012). *Sejarah Kerajaan Sriwijaya* : www.kumpulansejarah.com, Diunduh 4 Maret 2013. Jam 01.01
- Mahmud, Kiagus Imran (2004). *Sejarah Palembang* : suaramahmud.wordpress.com, Diunduh 3 Desember 2013. Jam 13.24
- Novita, Aryandini (2010). *Warisan Palembang Ada di Kampung Arab* : aryadininovita.blogspot.com, Diunduh 4 Desember 2013. Jam 13.41
- Sjarief, Roestam. *Sejarah Penataan Ruang Indonesia, Bab 7* : www.penataanruang.net, Diunduh 28 Maret 2013. Jam 08.56
- Saladin. *Mensyukuri Sungai Musi* : www.sumeks.co.id, Diunduh 5 Desember 2013. Jam 13.53
- Subadyo, Tatut. *Optimasi Potensi Artefak Budaya Pada Koridor Sungai Musi Untuk*

Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Palembang : ejournal.unsri.ac.id, Diunduh 4 Desember 2013. Jam 13.56

- Wijaya, Taufik (2009). *Kampung Tua Arab* : hot.detik.com, Diunduh 4 Desember 2014. Jam 13.35